



**Raja Juli Antoni**  
MENTERI KEHUTANAN

**Nusron Wahid**  
MENTERI ATR/BPN

**Agus Andrianto**  
MENTERI IMIPAS

**Dody Hanggodo**  
MENTERI PUPR

## Aktivis Desak Prabowo Reshuffle Empat Menteri

**JAKARTA | Harian Merdeka** – Presiden Prabowo Subianto didesak sejumlah aktivis, pemuda, dan tokoh publik untuk mengevaluasi sekaligus merombak empat menteri yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Halaman 7

### NASIONAL

Menteri PKP Resmikan  
Rumah Susun Santi  
Yayasan Nur Ilmi  
Prawira Subang

Halaman 2

### METRO

Polda Metro Jaya  
Dalam Kasus Dugaan  
Penyerangan Koordinator  
Sospol BEM UI

Halaman 5

### BOLA

Juara, Egy  
'Sang Kunci'

Halaman 8

## Budiman: Rocky Gerung di Wantimpres Jaga Kompas Moral Prabowo



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap terjebak pada angka dan kebijakan jangka pendek, sebuah pandangan mendalam datang dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko. Ia menyoroti pentingnya kehadiran akademisi dan pengkritik tajam, Rocky Gerung, di jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Bagi Budiman, kehadiran sosok dengan pijakan berpikir filosofis bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan penjaga kompas moral dan arah besar bangsa di sekeliling Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau Presiden hanya dikelilingi saran taktis, keputusannya akan efisien tapi bisa kehilangan koherensi strategis. Dengan masukan yang filosofis dan kritis, keputusannya bisa lebih strategis dan komprehensif,” ujar Budiman, Minggu (4/10/2026).

Budiman menilai Prabowo merupakan sosok pemimpin yang bergerak atas dasar substansi dan nilai-nilai konstitusional, seperti Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33.

Dalam menahkodai negara, seorang kepala negara tidak hanya butuh masukan teknis tentang apa yang harus dilakukan besok, tetapi juga pertanyaan mendasar tentang ke mana arah bangsa ini sedang dibawanya.

Kehadiran Rocky Gerung yang dikenal dengan daya kritis tanpa kompromi justru dipandang sebagai aset berharga.

Kejujuran dalam berpikir dan keberanian untuk tetap bersikap kritis adalah amunisi penting agar kekuasaan tidak kehilangan kepekaan nuraninya. ● (Egi)

# Menteri PKP Resmikan Rumah Susun Santi Yayasan Nur Ilmi Prawira Subang

SUBANG |  
**Harian Merdeka**

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Rumah Susun Yayasan Nur Ilmi Prawira yang diperuntukkan bagi santriwan dan santriwati di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan nyaman bagi para santri dalam mengakses pendidikan.

Pembangunan rumah susun tersebut diperuntukkan bagi Yayasan Nur Ilmi Prawira sebagai penerima bantuan dan diharapkan dapat mendukung kebutuhan tempat tinggal para santriwan dan santriwati selama menjalani pendidikan.

Rumah susun tersebut terdiri atas dua lantai dengan kapasitas 82 orang. Bangunan memiliki luas lahan sekitar 1.508 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 576,8 meter persegi. Pada lantai dasar tersedia kapasitas hunian untuk 36 orang serta dua tempat tidur single, sedangkan lantai dua memiliki kapasitas 44 orang.

Pembangunan rumah susun dilaksanakan pada tahun 2024 hingga 2025 dan kini telah dapat dimanfaatkan oleh para santriwan dan



santriwati Yayasan Nur Ilmi Prawira.

alam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait berdialog dengan penghuni untuk menerima masukan mengenai kondisi rumah susun setelah digunakan. Beberapa santriwan menyampaikan bahwa kondisi fasilitas rumah susun cukup baik. Air tersedia dengan baik dan tidak panas, sementara kondisi bangunan juga tidak mengalami kerusakan maupun kebocoran.

Menanggapi hal tersebut, Maruarar meminta para penghuni untuk menyampaikan apabila terdapat kendala pada bangunan agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Kalau ada yang kendala seperti bocor, tolong kasih tahu ya, nanti diperbaiki,” ujar Maruarar.

Rusun dilengkapi dengan

berbagai fasilitas pendukung. Selain ruang hunian, bangunan juga dilengkapi ruang pengelola, kamar mandi komunal, ruang wudhu, area cuci dan jemur, serta balkon. Selain itu, lokasi rumah susun yang dekat dengan sekolah turut memudahkan para santri dalam menjalani aktivitas pendidikan sehari-hari.

Keberadaan rumah susun tersebut diharapkan dapat memberikan hunian yang layak, nyaman, dan mendukung aktivitas pendidikan para santriwan dan santriwati Yayasan Nur Ilmi Prawira. Kementerian PKP terus mendorong penyediaan hunian yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

# YLBHI: Perluasan Peran Militer di Sektor Sipil Ancam Demokrasi dan Reformasi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Lebih dari seperempat abad setelah Reformasi 1998 berupaya mengembalikan militer ke barak dan menegakkan supremasi sipil, batas antara urusan pertahanan dan kehidupan sipil kembali dikaburkan. Laporan pemantauan LBH-YLBHI 2025-2026, Republik dalam Cengkeraman Loreng: Perluasan Peran Militer dan Peningkatan Reformasi, merekam bagaimana perluasan peran TNI berlangsung bukan melalui kudeta, melainkan melalui undang-undang, peraturan presiden, instruksi, nota kesepahaman, serta alokasi anggaran yang membuka jalan bagi militer masuk semakin jauh ke dalam urusan sipil.

Dalam periode 1 Oktober 2025

hingga 30 September 2026, LBH-YLBHI mendokumentasikan 58 kasus atau rangkaian peristiwa, meliputi kekerasan dan pembatasan kebebasan sipil, persoalan pertanggungjawaban hukum, serta perampasan tanah dan ruang hidup. Pada saat yang sama, YLBHI memetakan sedikitnya 192 Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) di 164 kabupaten/kota, bersamaan dengan perluasan struktur komando teritorial dan keterlibatan TNI dalam pangan, kehutanan, koperasi desa, program gizi, hingga pelatihan warga sipil.

Laporan ini juga menemukan bahwa perluasan tersebut ditopang oleh aliran anggaran dari banyak pintu, lemahnya keterbukaan pengadaan, serta mekanisme pertanggungjawa-

ban yang masih menyisakan impunitas. Dalam konflik agraria, kehadiran institusi bersenjata bahkan menempatkan warga dalam posisi yang semakin timpang ketika pihak yang berkepentingan atas tanah sekaligus memiliki kekuatan koersif. YLBHI menilai keadaan ini menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan sedang dibatalkan secara sistematis, sementara negara hukum dan supremasi sipil perlahan diko-

songkan dari dalam.

Melalui laporan ini, YLBHI mendesak pemerintah dan DPR menghentikan perluasan komando teritorial, mengembalikan urusan sipil kepada lembaga sipil, memperkuat pengawasan anggaran dan pengadaan pertahanan, mereformasi peradilan militer, serta memastikan setiap korban kekerasan dan perampasan ruang hidup memperoleh keadilan dan pemulihan.

● (Egi)

## Prabowo Puji Semangat Pantang Menyerah Timnas Indonesia Juara FIFA Asean Cup 2026

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Tim Nasional Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda menundukkan Thailand melalui drama adu penalti dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Pertandingan final yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto tersebut berlangsung ketat hingga waktu normal berakhir. Kedua tim baru mampu memecah kebuntuan pada menit-menit akhir pertandingan.

Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-84 melalui tendangan bebas Dean James. Gol tersebut tercipta setelah pemain Thailand, Nicholas Mickelson, mendapat kartu merah



akibat akumulasi kartu kuning.

Namun, keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Thailand mampu menyamakan kedudukan melalui Ikas Sanron pada menit ke-87. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Drama kembali terjadi pada babak tambahan. Thailand berbalik unggul setelah Peerapol Chamrasamee mencetak gol pada menit ke-111.

Indonesia kemudian kembali menyamakan kedudukan lima

menit berselang. Elkan Baggott mencetak gol pada menit ke-116 dan membuat skor menjadi 2-2.

Tidak ada gol tambahan hingga 120 menit pertandingan. Penentuan juara akhirnya dilakukan melalui adu penalti.

Dalam babak adu penalti, Indonesia tampil lebih efektif dan berhasil menang 4-2 atas Thailand. Hasil tersebut memastikan Indonesia mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus menjadi juara pertama dalam sejarah turnamen tersebut.

Kemenangan ini menjadi catatan baru bagi sepak bola Indonesia di ajang internasional FIFA. Turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana yang mempertemukan tim-tim nasional dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah tim undangan.

Presiden Prabowo menyaksikan langsung laga final tersebut

dari tribun SUGBK. Ia hadir bersama Presiden FIFA Gianni Infantino serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Usai pertandingan, Prabowo bersama Infantino turut menyerahkan medali dan trofi kepada para pemain Timnas Indonesia sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Prabowo mengaku bangga dengan perjuangan yang ditunjukkan para pemain Indonesia sepanjang pertandingan. Menurutnya, semangat untuk terus berjuang hingga pertandingan berakhir menjadi hal penting dari kemenangan tersebut.

"Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir," ujar Prabowo dalam keterangan resminya, Senin (5/10).

● (Egi)



## Kemenimipas: Miras dan Barang Mewah di Lapas Cibinong Milik Jimmy Masrin

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) menyebut minuman keras dan sejumlah barang mewah yang ditemukan di Lapas Cibinong bukan milik petugas, melainkan milik warga binaan atas nama Jimmy Masrin.

Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan mengatakan, hasil investigasi internal memastikan barang-barang tersebut berada di rumah yang ditempati Jimmy Masrin, termasuk sosok yang terlihat dalam rekaman kamera.

"Kita berpindah ke fasilitas mewah yang ditemukan. Ini ramai diperbincangkan masalah minuman keras. Hasil dari investigasi kami bahwa barang tersebut bukanlah milik sebagaimana yang disebutkan Kasikamtib atas nama Adi Nugroho Wicaksono, melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut, atas nama Jimmy Masrin," ujar Rudi dalam konferensi pers, Senin (5/10/2026).

Rudi menegaskan barang-barang mewah lainnya juga diadakan oleh warga binaan sendiri. Saat Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto melakukan sidak, barang-barang tersebut sudah tidak ada di lokasi.

"Jadi pada tanggal 23 malam, barang-barang itu dipindahkan. Sebagian ada yang kita berhasil temukan dan sebagian lagi ada yang sudah dibawa keluar, dan kita temukan di bekas kandang sapi tersebut," katanya.

Karena bukan barang tercatat milik negara, barang-barang tersebut dihancurkan pada Kamis lalu agar tidak dapat digunakan kembali. Hal yang sama berlaku untuk bangunan-bangunan yang dibangun tanpa menggunakan uang negara.

Selain rumah Jimmy Masrin, Kemenimipas juga menemukan guest house yang awalnya merupakan kantor gudang, kantor sarana asimilasi dan edukasi yang kemudian diubah fungsi. Sumber dananya juga berasal dari warga binaan dan digunakan untuk menerima kunjungan. Temuan lain adalah tiga kontainer yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), namun isinya diadakan oleh warga binaan. Salah satu kontainer ditempati warga binaan Indra Kesuma alias Indra Kenz. ● (Egi)

# Tersangka Sudah Diumumkan, Publik Tagih Kelanjutan Pengusutan Korupsi PJUTS ESDM

JAKARTA |  
**Harian Merdeka**

Kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali dipertanyakan.

Setelah tiga tersangka ditetapkan pada 31 Desember 2025, perkembangan penyidikan perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian negara Rp19,52 miliar itu hingga kini belum banyak diketahui publik.

Sorotan tersebut disampaikan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). Lembaga ini mempertanyakan sejauh mana Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kortas Tipikor Polri) menindaklanjuti perkara pengadaan proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp109 miliar tersebut.

Sekretaris CERI Hengki Seprihadi, menilai publik membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan perkara, terutama setelah penyidik mengumumkan tiga tersangka dan

melakukan sejumlah tindakan hukum.

"Setelah penetapan tiga tersangka diumumkan, publik tentu berharap ada kejelasan mengenai kelanjutan proses hukumnya. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pengumuman penetapan tersangka, tetapi tidak memperoleh informasi mengenai perkembangannya," ujar Hengki dikutip Selasa (6/10/2026).

Menurut CERI, persoalan tersebut tidak berhenti pada penetapan tersangka. Publik juga perlu mengetahui bagaimana penyidik menuntaskan rangkaian pemeriksaan, menelusuri aliran dana, menguji alat bukti, memastikan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan 6.835 unit PJUTS di tujuh provinsi pada Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan

penyidik, dugaan kerugian negara mencapai Rp19.522.256.578,74 atau sekitar Rp19,52 miliar.

Nilai tersebut menjadi sorotan karena perkara menyangkut proyek dengan anggaran sekitar Rp109 miliar. Karena itu, CERI menilai perkembangan penanganannya layak diketahui publik sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.

Tiga Tersangka, Perkara Belum Terlihat Ujungnya

Dalam perkara tersebut, Kortas Tipikor menetapkan tiga tersangka.

Mereka yakni Akhmad Syakhroza, mantan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM periode 2017-2023; M Halim Sari Wardana, mantan Sekretaris Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran periode 2019-2021; serta Linus Andor Mulana Sijabat, mantan Direktur Operasional PT LEN Industri.

Konstruksi perkara yang dipaparkan penyidik mencatat sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan. ● (Egi)



# Polda Metro Jaya Dalam Kasus Dugaan Penyerangan Koordinator Sospol BEM UI

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Polisi mulai mendalami dugaan penganiayaan yang menimpa Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernan-da, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kasus ini mencuat setelah dugaan penyerangan terhadap Hafidz viral di media sosial. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Minggu malam (4/10/26), sekitar pukul 23.50 WIB di kawasan Tebet Barat Dalam IX.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, mengatakan pihaknya telah mengetahui informasi mengenai dugaan penyerangan terhadap mahasiswa tersebut.

“Adanya kejadian penyerangan terkait tentang salah satu mahasiswa dari BEM UI. Ini kita sangat prihatin atas insiden yang terjadi. Tentunya kami dari Polda Metro Jaya akan mendalami peristiwa ini yang kejadian di Tebet, adanya pemukulan ataupun dugaan penganiayaan kepada salah satu dari organisasi mahasiswa,” kata dia, dikutip Selasa (6/10/26).

Meski korban belum membuat laporan, Budi menegaskan pihaknya akan langsung mendalami. Namun, polisi meminta agar korban segera membuat laporan terkait hal tersebut guna membantu proses dalam menyelidiki.

“Dan kami juga berharap dari korban ataupun pihak-pihak tertentu untuk bisa dapat menyampaikan laporan, tetapi sebelum laporan itu ada, tetap Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, akan mengumpulkan beberapa barang-barang bukti untuk melakukan pengungkapan terkait tentang dugaan penganiayaan terhadap salah satu mahasiswa,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, Hafidz disebut tengah mengendarai sepeda motor ketika tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal (OTK).

Dugaan penyerangan itu disebut tidak berhenti pada kekerasan fisik. Pelaku juga diduga mengancam dan mengambil telepon genggam milik Hafidz.

Di tengah proses pendalaman polisi, Universitas Indonesia (UI) memastikan memberikan perha-

tian terhadap kondisi Hafidz.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, mengatakan pihak kampus telah berkomunikasi dengan Hafidz, keluarga, dan pengurus BEM UI.

“UI prihatin atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap siapa pun tidak dapat dibenarkan, termasuk terhadap mahasiswa UI,” kata Erwin.

Saat ini, Hafidz disebut

masih menjalani perawatan di rumah sakit. UI menempatkan keselamatan dan pemulihan mahasiswa tersebut sebagai prioritas.

Kampus juga menyiapkan pendampingan, termasuk dalam urusan hukum agar hak Hafidz tetap terlindungi selama perkara diproses.

“Ketiga, pendampingan konsultasi hukum untuk memastikan hak-hak mahasiswa terlindungi selama proses berlangsung,” tuturnya. ● (Egi)



## Polisi Usut Asal-usul Narkoba Dipasok Pegawai Rutan Depok buat Party



DEPOK | **Harian Merdeka**

Polres Metro Depok mengungkapkan peran dua pegawai rumah tahanan (rutan) Depok yang diduga terlibat terkait sekelompok narapidana berjoget dan mengonsumsi narkoba.

Kedua petugas rutin itu juga telah menjalani tes urine.

“Sudah tes urine, masih negatif,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra Selasa (6/10/2026).

Pihaknya mendalami asal sabu

yang dibawa kedua pegawai tersebut. Hasil pemeriksaan akan mengacu untuk sanksi dari Kepala Lapas.

“Tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut. Kemudian, hasil pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa dua pegawai tersebut tidak terindikasi sebagai pemakai narkoba. Namun mereka menyediakan sabu dan alat musik ke dalam rutin.

“Tidak ada (indikasi pemakai), karena dua orang ini, mereka berdua ini hanya menyediakan sabu dan menyediakan alat musik, seperti itu,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, tim

dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas dugem dan penyalahgunaan narkoba di dalam rutin.

Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno membenarkan bahwa video tersebut memang direkam di salah satu kamar hunian warga binaan. Kamar tersebut diketahui dihuni oleh 22 warga binaan. Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak empat warga binaan diperiksa lebih lanjut terkait dugaan aktivitas yang terekam dalam video tersebut. ● (Egi)



## Rekam Jejak Irjen Rizal Irawan, Mantan Deputy KLH yang Kini Pimpin Polda Sulteng

JAKARTA |  
**Harian Merdeka**

Mutasi dan penyegaran kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergulir. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Rizal Irawan secara resmi mengemban amanah baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Penunjukan ini tertuang dalam Surat Telegram Polri Nomor ST/2205/X/KEP./2026, di mana Irjen Rizal Irawan dipercaya memimpin Polda Sulteng menggantikan Irjen Pol. Nasri Sulaeman yang memasuki masa purnatugas.

Sebagai perwira tinggi (pati) Polri yang dikenal profesional dan memiliki rekam jejak terstruktur, penunjukan Irjen Rizal Irawan diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tengah.

Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karier

Lahir di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Irjen Rizal Irawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1995 dari

Batalyon Patria Tama. Sejak awal meniti pengabdian di Korps Bhayangkara, karier militer dan kepolisiannya banyak bersinggungan langsung dengan fungsi reserse serta penegakan hukum.

Di tingkat kewilayahan (polres), Rizal tercatat pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, di antaranya sebagai Kapolres Kotabaru serta Kapolres Tanah Laut di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan (Kalsel). Pengalaman lapangan ini membentuk ketajamannya dalam memetakan kerawanan sosial dan penanganan tindak pidana di daerah.

### Rekam Jejak di Bidang Reserse dan Bareskrim Polri

Karier struktural Irjen Rizal terus merangkak naik ketika ia ditarik ke tingkat polda dan Markas Besar (Mabes) Polri. Ia pernah dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalsel.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Ses-pimti) Polri pada tahun

2020, penugasannya semakin luas. Rizal pernah menjabat sebagai Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, hingga mengemban tugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum). Pengalaman panjang di lini penyidikan ini menjadikannya figur yang sangat berpengalaman dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan konvensional maupun transnasional.

Penugasan Luar Struktur: Intelijen hingga Lingkungan Hidup

Selain murni berkarier di bidang kepolisian konvensional, Irjen Rizal Irawan juga memiliki rekam jejak penugasan luar struktur yang memperkaya wawasan kepemimpinannya. Pada tahun 2023, ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi dan ditugaskan di Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai Direktur Pertanian, Pertahanan, dan Kelautan pada Deputy Bidang Intelijen Ekonomi. ● (Egi)

## Listyo Sigit Prabowo Siap Lanjutkan Tugas di KSP Sukseskan Program Presiden



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo siap melanjutkan tugas di Kantor Staf Presiden (KSP) demi menyukseskan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Apalagi kita tahu permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan,” kata Sigit dalam acara serah terima jabatan di Gedung KSP, Jakarta, Senin,

Beberapa program itu termasuk yang sudah tertuang di dalam Astacita serta turunannya, yaitu 17 program prioritas Presiden Prabowo yang terbagi dalam beberapa sektor termasuk pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dia mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh Dudung Abdurachman, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Ia juga mengajak jajaran KSP untuk bekerja sama menjalankan tugas-tugas mendukung berbagai program pemerintah.

Di kesempatan yang sama, Dudung menegaskan peran KSP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait berbagai isu di sejumlah program prioritas pemerintah.

“Kita bisa memantau, mengecek, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Karena pasti banyak bottleneck-nya, banyak sumbatan-sumbatan, banyak hambatan-hambatan yang selama ini tidak tuntas,” tutur Dudung.

Dia memberikan contoh beberapa kali melakukan koordinasi dan peninjauan ke lapangan terkait pengembangan tiga proyek migas strategis nasional di sejumlah daerah.

Selain itu, Dudung juga pernah melakukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan batu bara yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) demi mencegah mati lampu di Pulau Jawa. Menutup sambutannya, Dudung mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dan meminta dukungan serta doa untuk tugas barunya di Kemenko Polkam. ● (Egi)

# Cegah Industri Lokal Mati Suri, Menperin Minta Pengawasan Impor Diperketat

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti ancaman arus barang impor yang dapat menekan kelangsungan sektor industri dalam negeri.

Sarmuji menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas kementerian agar regulasi perdagangan, khususnya izin impor tidak mematikan para pelaku usaha lokal.

Hal itu disampaikan Sarmuji usai memimpin rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Direktorat Jenderal Industri Agro di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa banyak persoalan penting sektor

manufaktur yang penyelesaiannya berada di luar kewenangan internal Kemenperin.

Menurut Sarmuji, hal itu memerlukan kerja sama erat dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Sarmuji menyebut kebijakan perdagangan yang longgar tanpa pertimbangan matang terhadap kapasitas produksi domestik akan membuat industri nasional kesulitan bertahan.

"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain, itu harus kita perkuat. Karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan bagaimana celah pada regulasi impor dapat berdampak langsung terhadap ketahanan sektor riil nasional.



Sarmuji menilai pengawasan dan pembatasan yang terukur dapat menjadi poin penting untuk melindungi produk lokal dari serbuan barang luar.

"Saya contoh misalkan di Kementerian Perdagangan, kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada per-

timbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang-barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tegasnya.

● (Egi)

## Insentif SPPG Jadi Rp2.000 per Porsi, BGN Jamin Mitra Tetap Dapat Untung



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Skema insentif untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi berubah. Badan Gizi Nasional (BGN) kini tidak lagi memberikan insentif dengan nominal yang sama kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan menghitungnya berdasarkan jumlah porsi makanan yang dilayani.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Besaran Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi, besaran insentif ditetapkan menjadi Rp2.000 per porsi. Angka tersebut berbeda dari skema sebelumnya yang memberikan insentif Rp6 juta per hari.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan perubahan formula tersebut tetap membuat mitra SPPG tidak merugi. Namun, ia menegaskan skema baru bukan untuk membuat pengelola dapur MBG meraup keuntungan besar dalam waktu singkat.

"Mitra itu tidak mungkin rugi, tapi tidak bisa kemudian untung gede-gede gitu loh. Ini

kan bisa dibilang kan MBG ini kalau katakanlah semacam kegiatan utilitas," kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Sudaryono, keuntungan dalam skema tersebut lebih mengandalkan volume dan keberlangsungan layanan. Artinya, meski insentif yang diterima per porsi tidak besar, layanan yang berlangsung dalam jangka panjang tetap memberikan keuntungan bagi mitra.

"Utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau untungnya kan nggak gede, tapi volume. Mainnya volume dan main panjang, gitu loh," ujarnya.

Ia menilai pola tersebut berbeda dengan pekerjaan yang hanya dilakukan sekali lalu langsung menghasilkan keuntungan. Dengan layanan MBG yang berjalan terus-menerus, investasi yang dikeluarkan mitra tetap memiliki peluang pengembalian.

"Kan ini bukan kegiatan yang sekali, katakanlah sekali kerja, sekali untung kan nggak, ini kan terus-menerus. Dengan 2.000 per porsi itu kan artinya bahwa investasi itu, investasinya mitra itu kan dijamin ada pengembaliannya, ada untungnya," jelas Sudaryono.

Sebelumnya, Sudaryono menjelaskan perubahan skema tersebut dilakukan karena jumlah penerima manfaat dan kapasitas pelayanan setiap SPPG berbeda.

"Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun kemudian mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari, itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan ke penerima manfaat," ungkap Sudaryono dalam postingan Instagram. ● (Egi)

# SARAH AZHARI TAMPIL KECE DENGAN TOPI JERAMI

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Artis Sarah Azhari membagikan momen saat dirinya menikmati suasana Kota Tua Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Sarah tampil santai namun tetap kece dengan gaya khasnya.

Sarah mengunjungi kawasan Kota Tua Jakarta belum lama ini bersama seorang temannya. Ia terlihat mengenakan pakaian berwarna hijau,acamata, serta topi jerami yang membuat penampilannya semakin menarik.

Dalam sejumlah foto yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, Sarah dan sang teman terlihat berfoto di kawasan pinggir kali yang menjadi salah satu ciri khas Kota Tua.

Sarah juga mengabadikan momen saat berswafoto bersama temannya dengan latar matahari yang mulai tenggelam.

Suasana sore dengan cahaya keemasan semakin mempercantik foto tersebut.

"Dinding-dinding tua, cahaya keemasan, dan sedikit perjalanan melintasi waktu. Terhanyut dalam pesona Kota Tua Jakarta," tulis Sarah Azhari, dikutip dari Instagram, Senin (5/10/2026).

Unggahan tersebut mendapat perhatian dari netizen. Sejumlah warganet memberikan pujian terhadap penampilan Sarah saat menikmati suasana Kota Tua Jakarta.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan sisi santai Sarah Azhari ketika menikmati salah satu kawasan bersejarah dan ikonik di Ibu Kota. ● (hmi)



# BaraNusa Geruduk PDAM Tirta Asasta, Desak Dirut Dicotot dan Dugaan Korupsi Diusut Tuntas

DEPOK | **Harian Merdeka**

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Kota Depok menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Tirta Asasta (Persero) atau PDAM Kota Depok, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).

Aksi yang dipimpin Ketua DPD BaraNusa Kota Depok, Entin Rosmini, tersebut membawa sejumlah tuntutan keras terkait persoalan pelayanan air bersih, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek, hingga dugaan pelanggaran terhadap ruang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

BaraNusa mendukung langkah Komisi VII DPR RI yang tengah menyoroti paradoks pengelolaan air, di mana air sebagai kebutuhan dasar masyarakat justru diduga lebih mudah mengalir untuk kepentingan industri dibandingkan memenuhi kebutuhan warga.

BaraNusa bahkan menantang jajaran direksi dan staf PDAM Kota Depok untuk meminum langsung air PDAM dari keran warga sebagai bentuk pembuktian bahwa kualitas air yang



diterima masyarakat memang layak dan aman.

“Kalau memang air PDAM yang dialirkan ke rumah-rumah warga berkualitas dan layak diminum, kami tantang Dirut dan jajaran PDAM minum langsung air dari keran warga. Jangan hanya bicara kualitas di atas kertas,” tegas Entin.

Menurut BaraNusa, persoalan krisis air bersih tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Krisis air disebut telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Depok, di antaranya Kecamatan Beji, Sawangan, Cipayung, Bojongsari dan Tapos.

“Air adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai ma-

sarakat harus membeli air atau kesulitan mendapatkan air bersih, sementara persoalan tata kelola dan pelayanan PDAM justru tidak pernah dibuka secara terang kepada publik,” ujarnya.

## Soroti Intake dan Dugaan Pelanggaran Garis Sempadan Sungai

BaraNusa juga mendesak agar persoalan bangunan intake yang diduga melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) segera ditindaklanjuti. Menurut Entin, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, keselamatan bangunan, lingkungan serta tata kelola sumber daya air.

“Kalau memang ada bangunan intake yang berdiri di wilayah yang melanggar ketentuan GSS, jangan dibiarkan. Relokasi harus dilakukan apabila memang hasil pemeriksaan otoritas berwenang menyatakan bangunan tersebut melanggar aturan,” katanya.

## Dugaan Gratifikasi dan Proyek Water Tank Harus Dibuka

BaraNusa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan gratifikasi atau suap yang disebutkan berkaitan dengan pihak tertentu di lingkungan PDAM.

Selain itu, BaraNusa menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek water tank, termasuk persoalan yang dikaitkan dengan kajian Lamtek Universitas Indonesia. BaraNusa meminta aparat penegak hukum memeriksa secara menyeluruh dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, termasuk informasi mengenai pondasi yang disebut seharusnya mencapai sekitar 22 meter namun teridentifikasi hanya sekitar 10 meter, serta dugaan perubahan mutu beton dari spesifikasi yang seharusnya K-300 menjadi K-250.

● (Egi)

# Ledakan di Pakuwon City Surabaya Rusak 41 Bangunan dan Sejumlah Kendaraan



DEPOK | **Harian Merdeka**

Ledakan keras yang terjadi di RM Nasi Temping Sri Dewi, kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, menyebabkan sedikitnya 41 bangunan mengalami kerusakan. Sejumlah kendaraan yang berada di sekitar lokasi juga terdampak.

Kapolrestabes Surabaya

Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap dampak ledakan. Sebagian besar kerusakan berupa pecahnya kaca bangunan akibat getaran yang ditimbulkan ledakan.

“Sampai saat ini ada kurang lebih 41 yang mengalami rusak, berupa pecah kaca sebagian besar karena memang dari ledakan itu cukup

menimbulkan getaran yang cukup kuat. Dan terus kita akan dalam kembali,” kata Luthfie dilansir detikJatim, Selasa (6/10/2026).

Luthfie menjelaskan, bangunan yang terdampak tidak hanya berupa ruko di sekitar lokasi. Sejumlah rumah yang berada di belakang titik ledakan juga mengalami kerusakan.

“Ada ruko yang di seputaran lokasi ini, kemudian 15 itu rumah yang di belakang. Rusak parahnya lima, yang lainnya rusak ringan aja ya,” ujarnya.

Polisi belum menyampaikan secara pasti radius dampak ledakan. Namun, Luthfie memastikan getaran yang ditimbulkan cukup kuat hingga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar lokasi.

Selain bangunan, sejumlah kendaraan juga mengalami kerusakan. Berdasarkan pantauan di lokasi, area ledakan telah dipasangi garis polisi. Sedikitnya empat mobil, 11 sepeda motor, dan satu truk tercatat berada di area yang terdampak.

Tiga sepeda motor mengalami kerusakan paling parah. Ketiganya diketahui terparkir tepat di depan RM Nasi Temping Sri Dewi ketika ledakan terjadi.

Sejumlah mobil juga terdampak, di antaranya BYD, Toyota, Mercedes-Benz, dan Suzuki. Polisi masih melakukan pendataan dan pendalaman untuk memastikan seluruh dampak akibat ledakan tersebut.

● (Egi/hmi)



## Apresiasi Warga Taat Pajak, Wabup Serang Najib Hamas Beri Hadiah

SERANG | **Harian Merdeka**

Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, memberikan langsung hadiah berupa umroh gratis untuk Wajib Pajak (WP) hasil undian yang telah diundi pekan lalu.

Pemenang umroh gratis ini atas nama Ujen (60) warga dari Desa Mender, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Senin 5 Oktober 2026.

Bapenda Kabupaten Serang mencatat bahwa Ujen ini tidak pernah ada tunggakan pajak, dan setiap tahunnya selalu tepat waktu dalam membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Diketahui dalam rangka perayaan HUT ke 500 Kabupaten Serang, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah melakukan pengundian hadiah umroh gratis untuk wajib pajak, di Pendopo Bupati Serang, pada Senin 28 September 2026.

Najib Hamas mengatakan, kehadirannya mewakili Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Serang Lalu Farhan Nugraha, menyerahkan hadiah umroh gratis untuk wajib pajak pemenang undian.

“Saya hadir menyerahkan reward atau hadiah umrah gratis, untuk pembayar pajak yang jujur dan terbaik atas nama pak Ujen, berdomisili di Kampung Babakan, Desa Mander, Kecamatan Bandung,” katanya kepada wartawan.

Kata Najib, sebagai warga negara yang baik tentu diwajibkan dalam membayar pajaknya, meskipun nilainya kecil atau besar yang terpenting ialah konsistensi dan ketepatan membayar pajak tanpa ada tunggakan.

Sehingga pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah daerah, terhadap wajib pajak yang patuh dalam membayarkan pajaknya tanpa ada tunggakan apapun.

“Ini contoh yang baik bahwa bukan besar bukan kecilnya besaran pajak, tetapi adalah konsistensi atau ketepatan membayar pajak, sesuai dengan kewajiban warga negara Indonesia khususnya Kabupaten Serang,” ujarnya.

Dikatakan Najib, dengan membayar pajak tentu ini bagian dari kontribusi masyarakat ikut serta dalam membangun Kabupaten Serang, karena pembangunan ini dari rakyat untuk rakyat. ● (Egi)



## Belum Beroperasi, Polres Lebak Tegaskan SPPG Polri Rangkasbitung Tidak Terbengkalai

LEBAK | **Harian Merdeka**

Polres Lebak memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di wilayah Rangkasbitung yang beredar di masyarakat dan disebut dalam kondisi terbengkalai atau tidak terawat.

Kapolres Lebak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Kasihumas Polres Lebak Iptu Moestafa Ibnu Syafir menjelaskan bahwa informasi tersebut perlu diluruskan.

SPPG tersebut sejak selesai dibangun hingga saat ini memang belum beroperasi dan belum digunakan untuk kegiatan pelayanan.

“Perlu kami luruskan bahwa SPPG tersebut memang sejak selesai dibangun sampai saat ini belum beroperasi dan belum digunakan untuk kegiatan pelayanan. Jadi, kondisi bangunan yang terlihat dalam dokumentasi bukan karena ditinggalkan

atau mangkrak,” ujar Iptu Moestafa.

Menurutnya, kondisi beberapa bagian area yang tampak ditumbuhi tanaman merupakan dampak dari fasilitas yang belum digunakan secara aktif.

Hal tersebut tidak dapat serta-merta diartikan bahwa bangunan tersebut terbengkalai.

“Karena memang belum digunakan secara aktif, ada bagian area yang terlihat ditumbuhi tanaman. Namun hal tersebut bukan berarti fasilitas tersebut ditinggalkan atau terbengkalai, melainkan karena SPPG memang belum masuk tahap operasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Polres Lebak terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memastikan kesiapan sarana dan prasarana SPPG sebelum nantinya digunakan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait

untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap sebelum SPPG tersebut nantinya digunakan dan beroperasi,” tambahnya.

Kasihumas juga mengimbau masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan suatu kondisi hanya berdasarkan dokumentasi atau informasi yang beredar, tetapi tetap mengedepankan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, informasi yang menyebut SPPG Polri tersebut “terbengkalai” atau “mangkrak” perlu diluruskan. Kondisi sebenarnya adalah fasilitas tersebut belum beroperasi dan belum pernah digunakan sejak selesai dibangun.

Polres Lebak berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang jelas dan berimbang kepada masyarakat serta memastikan setiap tahapan kesiapan fasilitas pelayanan berjalan sesuai ketentuan sebelum digunakan. ● (Egi)

# Hakim MK Soroti Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran: yang Disetarakan Pengetahuan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang turut mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026).

Dalam persidangan sebelumnya, hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti surat penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019. Menurut Arsul, surat tersebut berbeda dengan dokumen penyetaraan pendidikan tinggi yang diterbitkan Kementerian lain.

Berdasarkan risalah persidangan MK, Arsul menilai terdapat perbedaan antara dokumen penyetaraan yang diterbitkan Kemendikbud dan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada 2019.

"Ini dua institusi, dua kementerian ya, yang mengurus tentang pendidikan, yang satu Pendidikan Dasar dan Menengah, dan yang satu Pendidikan Tinggi, itu mengeluarkan surat pernyataan yang tidak setara. Surat penyetaraannya tidak setara, Pak, padahal judulnya surat penyetaraan ini. Barangkali yang dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini lebih gampang, Pak, dipahami. Karena yang disetarakan, meskipun ini bentuknya keputusan, itu adalah ijazahnya. Maka, judul keputusannya pun adalah tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka," ujar Arsul.

Arsul kemudian meny-

oroti surat yang diterbitkan Kemendikbud terkait pendidikan Gibran di luar negeri. Ia menilai dokumen tersebut berbeda karena menyatakan bahwa Gibran memiliki pengetahuan yang setara dengan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), bukan menyetarakan ijazah.

"Ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Dirjen Dasmen ini, Dikdasmen ini. Ini agak bersayap, Pak, terus terang bagi kami untuk memahami. Di mana agak bersayapnya? Karena yang Bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan," ujar Arsul.

Menurut Arsul, perbedaan tersebut menimbulkan persoalan dalam memahami dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Ia juga menyinggung Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 yang disebut mengatur penyetaraan pendidikan luar negeri berdasarkan ijazah, sertifikat, atau diploma yang diperoleh peserta didik.

"Yang disetarakan itu adalah pengetahuannya, ya. Dinilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah. Ini agak abstrak, pak. Kalau yang dikeluarkan yang ini, ini gampang mengetahui. Setara, apa yang setara? Ijazahnya itu, lho. Tapi kalau ini yang setara adalah pengetahuannya," ujarnya.

## ### Kemendikdasmen Jelaskan Dasar Penyetaraan

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto yang hadir dalam persidangan kemudian memberikan penjelasan mengenai proses penyetaraan pendidikan Gibran. ● (Agus)

## AKTIVIS DESAK PRABOWO

Keempat menteri yang disorot yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusrion Wahid, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipras) Agus Andrianto, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Direktur OPPSi, Ahmad Syaelendra, mengatakan evaluasi terhadap para menteri tersebut diperlukan karena munculnya berbagai persoalan yang dinilai berpotensi mengganggu pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo.

"Mereka berempat kami nilai sudah tidak menjalankan tupoksi dengan benar dan banyak kasus yang ditimbulkan, sehingga mencoreng nama baik dan program Presiden," ujar Syaelendra kepada *Harian Merdeka*, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet. Jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, pergantian pejabat dinilai menjadi salah satu

langkah yang dapat ditempuh.

"Artinya, Presiden harus mencopot mereka dan menggantinya agar program Asta Cita Presiden tetap berjalan pada relnya," katanya.

Desakan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni salah satunya mengemukakan menyusul maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam diskusi publik yang digelar di Tugu Soekarno, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (4/10/2026) malam, sejumlah aktivis dan pemuda menilai penanganan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Aktivis sekaligus kreator konten Virdian Aurellio mengatakan pemerintah pusat perlu melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak karhutla. Menurutnya, kebijakan tidak cukup hanya disusun berdasarkan laporan dan rapat di Jakarta.

"Selama ini karhutla ditan- gani dari Jakarta dengan saya dapat laporan, rapat di ruang ber-AC, pernyataan pers jauh

dari titik api. Kami bosan pada kebijakan yang dibuat orang-orang yang tak pernah mencium asapnya sendiri," ujar Virdian.

Ia bahkan meminta Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berkantor selama 30 hari di Kalimantan Tengah.

Menurut Virdian, kehadiran pejabat di daerah terdampak tidak boleh sekadar berupa kunjungan singkat atau seremoni. Para pejabat, kata dia, perlu merasakan langsung kondisi masyarakat yang setiap hari menghadapi dampak kabut asap.

"Bukan kunjungan sehari, bukan foto di depan asap. Kami minta kehadiran nyata," tegasnya.

Virdian juga meminta para pejabat merasakan langsung kualitas udara yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah selama karhutla berlangsung.

"Nafas dengan udara yang sama, hidup dalam asap yang sama, sebulan penuh," ujarnya.

Ia menilai kehadiran lang-

sung pejabat di wilayah terdampak dapat memberikan perspektif berbeda dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla. Persoalan tersebut, menurutnya, tidak semestinya terus dipandang sebagai bencana musiman.

"Dan 30 hari cukup harusnya untuk membuat negara paham ini tidak normal, ini darurat yang terlalu lama dibiarkan menjadi musiman," katanya.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR), Naomi Simamora, menilai seruan tersebut merupakan bagian dari upaya generasi muda menagih keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla di Kalimantan Tengah.

Para pemuda yang hadir dalam diskusi juga mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi.

Langkah pencegahan, perlindungan masyarakat terdampak, serta evaluasi kebijakan penanganan karhutla dinilai perlu diperkuat.

● (Egi/hmi)

# JUARA, EGY 'SANG KUNCI'

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jangan lupa Egi Maulana Vikri yang jadi kunci di momen-momen genting!

Timnas Indonesia kalahkan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026, di SUGBK, Jakarta, Senin (5/10) dini hari WIB. Skor imbang 1-1 di waktu normal.

Di babak tambahan, skor kembali imbang 2-2. Lanjut ke adu penalti, Garuda menang

4-2!

Emil Audero perkasa menepis satu tembakan di adu penalti, satu lagi algojo Thailand kena tiang sepakannya. Elkan Baggott juga jadi pahlawan, ketika mencetak gol penyeimbang di menit ke-116.

Para skuad Timnas Indonesia tampil habis-habisan. Namun jangan lupa angkat topi untuk satu nama ini, Egi Maulana Vikri!

Egi Maulana Vikri masuk menggantikan Calvin Verdonk di menit ke-110. Egi main di pos say-

ap kanan, beberapa kali lepas umpan yang mengancam.

Gol dari Baggott pun lahir dari kreasinya. Egi dengan tenang menahan bola, lalu beri umpan ke Rizky Ridho yang masuk ke kotak penalti di sisi kanan. Ridho lepas umpan, ditepis kiper lalu bola jatuh ke kaki Baggott yang mampu dicepskannya!

Ketika hadapi Bangladesh di akhir fase Grup A, Egi Maulana Vikri turut kreasikan gol dengan pre-assist.

Egi dengan jeli melihat Ole Romeny yang berlari di sisi kiri lapangan. Umpan lambungnya ke ruang kosong begitu akurat, yang kemudian dikejar Ole dan berakhir umpan ke Baker untuk jadi gol kesembilan dan kunci tiket ke final.

Egi bermain dua kali di FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai pengganti di laga kontra Bangladesh dan Thailand. Meski total hanya catatkan 36 menit bermain, Egi sungguh jadi kunci pemecah kebuntuan! **● (Egi/hmi)**



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

**HARIAN MERDEKA**  
aspirasi rakyat

**Langganan ePaper...**

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**